

SUMMARY

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI ATAS WANPRESTASI EMITEN

Created by MALA KOMALASARI

Subject : perlindungan hukum, obligasi atas wanprestasi emiten

Subject Alt : protection of the law, for the tort of bond issuers

Keyword : perlindungan hukum;obligasi atas wanprestasi emiten

Description :

Obligasi merupakan salah satu pilihan investasi dengan resiko kecil karena mendapat return tetap di banding instrument lainnya seperti saham yang sangat agresif. Tetapi pada prakteknya dalam penerbitan obligasi, kadang-kadang terjadi gagal bayar atas pokok dan bunga obligasi. Penerbit obligasi (emiten) seharusnya bertanggung jawab kepada investor jika terjadi gagal bayar. Penulis meneliti perlindungan hukum terhadap investor obligasi atas wanprestasi yang dilakukan emiten. Tanggung jawab penerbit obligasi dalam hal gagal bayar menurut ketentuan hukum pasar modal dengan tujuan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dari penerbitan obligasi oleh pihak emiten dan menganalisa pertanggungjawaban penerbit obligasi kepada investor jika terjadi gagal bayar. Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum terhadap investor obligasi ini bisa dengan cara preventif yang melibatkan wali amanat pada saat perjanjian perwaliamatan di buat dan keterbukaan emiten kepada wali amanat, OJK (dulu Bapepam) dan investor. Pelindungan Hukum represif dapat diberikan oleh wali amanat yaitu dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau mengajukan penundaan vii

kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka sesuai ketentuan UUPM, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111 UUPM.

Kepentingan investor diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian perwaliamatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang obligasi Menurut penulis Undang-undang No.8 tahun 1995 dan Peraturan-peraturan BAPEPAM (sekarang OJK) terkait lainnya belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada investor karena masih terdapat beberapa celah yang menyebabkan investor mengalami kerugian, peran wali amanat sangatlah penting oleh karena itu track record dari wali amanat pun harus diperhatikan.

Contributor : Helvis
Date Create : 08/03/2017
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Master-201404056
Collection : 201404056
Source : Master theses of Law
Relation Collection Fakultas Hukum
COverage : Civitas Akademi Universitas Esa Unggul
Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor